



Dampak Stagnasi Pendidikan Menengah-Tinggi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Modal Manusia di Sulawesi Tenggara: Implikasi bagi Kebijakan Keuangan Daerah

Murniati

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia

*Email Korespondensi: murniatiulfamario@uho.ac.id

Diterima: 10-04-2026 | Disetujui: 18-04-2026 | Diterbitkan: 20-04-2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of stagnation in secondary-higher education on economic development and human capital in Southeast Sulawesi and to examine its implications for regional financial policies. Using a systematic literature review approach based on BPS data, empirical journals, and the latest education policies, this research finds that stagnation in access and quality of secondary-higher education is reflected in low school participation rates, decreasing average years of schooling, and significant regional and social group disparities. Structural barriers such as poverty, limited educational infrastructure, disparities in teacher distribution, and the effectiveness of educational aid policies are the main causes. Consequently, the workforce structure is dominated by lower secondary graduates, educated unemployment and informal workers remain high, and the demographic bonus has not been optimally utilized for regional economic transformation. The findings of this research indicate that regional fiscal policies—particularly the allocation of education budgets and the effectiveness of assistance programs—still need to be significantly improved, especially for secondary-higher education and underdeveloped areas. The reformulation of budget management strategies, improvement of education aid governance, and cross-sector collaboration are the main recommendations to ensure that education investments truly impact the enhancement of human capital quality and inclusive economic growth. This research also highlights the importance of data-driven policy innovation and strengthening the monitoring of educational programs to accelerate the sustainable transformation of human development in Southeast Sulawesi.

Keywords: Education; Human capital; Regional economy; Fiscal policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak stagnasi pendidikan menengah-tinggi terhadap pembangunan ekonomi dan modal manusia di Sulawesi Tenggara serta mengkaji implikasinya bagi kebijakan keuangan daerah. Dengan menggunakan pendekatan systematic literature review berbasis data BPS, jurnal empiris, dan kebijakan pendidikan terbaru, penelitian ini menemukan bahwa stagnasi pada akses dan kualitas pendidikan menengah-tinggi tercermin dari rendahnya angka partisipasi sekolah, menurunnya rata-rata lama sekolah, dan masih besarnya ketimpangan wilayah serta kelompok sosial. Hambatan struktural seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur pendidikan, disparitas distribusi guru, dan efektivitas kebijakan bantuan pendidikan menjadi penyebab utama. Konsekuensinya, struktur tenaga kerja didominasi lulusan menengah ke bawah, pengangguran terdidik dan pekerja informal tetap tinggi, serta bonus demografi belum memanfaatkan optimal untuk transformasi ekonomi daerah. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal daerah khususnya alokasi anggaran pendidikan dan efektivitas program bantuan masih perlu ditingkatkan secara signifikan, terutama untuk pendidikan menengah-

tinggi dan wilayah tertinggal. Reformulasi strategi pengelolaan anggaran, perbaikan tata kelola bantuan pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi rekomendasi utama agar investasi pendidikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas modal manusia dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya inovasi kebijakan berbasis data dan penguatan monitoring program pendidikan guna mempercepat transformasi pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan.

Katakunci: Pendidikan; Modal manusia; Ekonomi daerah; Kebijakan fiskal.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Murniati, M. (2026). Dampak Stagnasi Pendidikan Menengah-Tinggi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Modal Manusia di Sulawesi Tenggara: Implikasi bagi Kebijakan Keuangan Daerah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(2), 3588-3600. <https://doi.org/10.63822/6e211t42>

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan sentral dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas modal manusia. Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan perekonomian global serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam teori modal manusia, pendidikan dipandang sebagai investasi strategis yang mampu mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Becker, 1993; Romer, 1990). Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah-tinggi menjadi prasyarat penting dalam memperkuat pondasi pembangunan daerah, terutama di wilayah yang tengah menghadapi tantangan transformasi struktural seperti Sulawesi Tenggara.

Namun, realitas di tingkat daerah menunjukkan bahwa peran strategis pendidikan belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya pada jenjang menengah dan tinggi di Sulawesi Tenggara. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan adanya stagnasi dan bahkan kecenderungan penurunan partisipasi sekolah pada jenjang ini. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun (SMA/SMK) pada tahun 2025 hanya mencapai 79,58%, sementara APS usia 19–23 tahun (Perguruan Tinggi) stagnan di angka 33,67%. Penurunan juga terjadi pada Angka Partisipasi Murni (APM) SMA dari 66,66% (2024) menjadi 63,31% (2025), dan APM Perguruan Tinggi dari 28,00% menjadi 27,46%. Tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas pada kelompok usia 19–21 tahun masih rendah, yakni hanya 74,91%. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Tenggara hanya sekitar 9,56 tahun, atau setara kelas 3 SMP, yang menandakan masih banyak penduduk tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK maupun Perguruan Tinggi.

Faktor-faktor penghambat akses pendidikan di daerah seperti Sulawesi Tenggara telah dibahas Lintang & Pambudi (2025), yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, partisipasi lokal, dan alokasi sumber daya yang memadai agar hambatan geografis dan ekonomi dapat diatasi. Selain itu, ketimpangan fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, dan keterbatasan unit sekolah lanjutan memperburuk situasi (Muchtart et al., 2025). Hambatan struktural ini diperparah dengan angka kemiskinan yang masih tinggi (10,54% pada 2025), rendahnya daya beli masyarakat, dan berbagai faktor sosial seperti tingginya angka putus sekolah akibat pernikahan dini (Hasanah, 2025).

Konsekuensi stagnasi pendidikan menengah-tinggi sangat nyata bagi pembangunan ekonomi dan modal manusia di Sulawesi Tenggara. Struktur tenaga kerja didominasi lulusan SMP ke bawah, sehingga menghambat transformasi ekonomi ke sektor industri dan jasa bernilai tambah. Tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMK tercatat 5,54% dan untuk perguruan tinggi 4,80%, mencerminkan adanya mismatch antara output pendidikan dan kebutuhan dunia kerja (Putranto et al., 2024/2025). Penelitian Mulyaningsih, Adhitya & Rosalia (2021) juga menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan dan keterampilan berdampak signifikan terhadap penghasilan dan peluang kerja. Selain itu, kontribusi sektor primer terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih mendominasi lebih dari 40%, dan bonus demografi dengan proporsi usia produktif sebesar 67% belum termanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,40%.

Kendati sejumlah upaya telah dilakukan melalui kebijakan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), implementasi di lapangan masih menghadapi kendala distribusi dan birokrasi (Muchtart et al., 2025). Selain itu, inovasi seperti mobile learning terbukti cukup efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar di daerah terpencil, namun belum menjadi solusi utama secara luas

(Wahyuni et al., 2024; Sapiah et al., 2025).

Walaupun beberapa penelitian telah membahas akses pendidikan, mismatch pasar kerja, serta inovasi kebijakan pendidikan di Indonesia, kajian yang secara spesifik dan terintegrasi menyoroti dampak stagnasi pendidikan menengah-tinggi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan implikasinya terhadap kebijakan keuangan lokal di Sulawesi Tenggara masih sangat terbatas. Research gap ini menegaskan perlunya analisis lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang stagnasi pendidikan terhadap pembangunan modal manusia, struktur ekonomi, serta efektivitas kebijakan fiskal daerah.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memetakan secara komprehensif dampak stagnasi pendidikan menengah-tinggi terhadap pembangunan ekonomi dan modal manusia di Sulawesi Tenggara, serta merumuskan rekomendasi kebijakan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran guna memperkuat peran pendidikan sebagai pendorong utama pembangunan wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis (systematic literature review) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dampak stagnasi pendidikan menengah-tinggi terhadap pembangunan ekonomi dan modal manusia di Sulawesi Tenggara. Landasan teori yang digunakan mengacu pada teori modal manusia oleh Becker (1993) dan Romer (1990), yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Mekanisme penelitian ini dilakukan secara terstruktur melalui lima tahapan utama sesuai dengan kaidah systematic literature review (Snyder, 2019; Creswell, 2014). Tahap pertama adalah identifikasi literatur, di mana peneliti merumuskan fokus berdasarkan teori modal manusia serta melakukan penelusuran sumber data sekunder yang relevan seperti statistik resmi dari BPS dan Kemendikbud, jurnal ilmiah, dan laporan kebijakan. Tahap kedua adalah seleksi sumber data, yaitu memilih literatur yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi terkait tahun publikasi, relevansi topik, metode, serta kualitas sumber. Selanjutnya, pada tahap sintesis dan kategorisasi, peneliti mengekstrak data dari sumber terpilih dan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan hambatan pendidikan, kontribusi pendidikan terhadap ekonomi, serta kebijakan pendidikan daerah. Tahap keempat adalah interpretasi dan analisis, di mana temuan yang telah disintesis dianalisis secara kritis menggunakan kerangka teori modal manusia untuk menafsirkan dampak stagnasi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi. Terakhir, seluruh proses dirangkum dalam pelaporan sistematis yang transparan dan terdokumentasi dengan baik, guna memastikan validitas serta keterulangan hasil penelitian, sebagaimana ditegaskan oleh Snyder (2019), “The quality and transparency of a systematic review largely depend on clear inclusion and exclusion criteria as well as a documented and structured analytical process.”

Melalui mekanisme ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang kuat dan relevan dalam menjelaskan peran pendidikan menengah-tinggi terhadap pembangunan ekonomi dan modal manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Kuantitatif Stagnasi Pendidikan Menengah-Tinggi di Sulawesi Tenggara

Pembangunan pendidikan menengah dan tinggi di Sulawesi Tenggara masih menghadapi tantangan serius, ditandai dengan stagnasi dan bahkan penurunan partisipasi pada jenjang SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Berdasarkan data BPS (Statistik Pendidikan Sulawesi Tenggara 2024; Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Tenggara 2025), Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok umur 16–18 tahun (setara SMA/SMK) pada tahun 2024 adalah 75,73%, dan meningkat sedikit menjadi 79,58% pada 2025. Namun, untuk kelompok umur 19–23 tahun (setara Perguruan Tinggi), APS hanya 33,37% di 2024 dan 33,67% di 2025. Angka ini menunjukkan bahwa dua dari tiga penduduk usia kuliah tidak berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, jika melihat Angka Partisipasi Murni (APM), yang merepresentasikan anak yang bersekolah tepat usia di jenjang pendidikan tertentu, kondisinya justru stagnan atau menurun. APM SMA/SMK di tahun 2024 adalah 66,66% dan turun menjadi 63,31% pada 2025. Untuk Perguruan Tinggi, APM turun dari 28,00% di 2024 menjadi 27,46% di 2025. Ini berarti, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah partisipasi murni, dan menandakan masih banyak anak usia sekolah yang tidak bisa mengakses pendidikan pada jenjang dan usia yang semestinya.

Tabel 1. Indikator Kesejahteraan rakyat 2025

Indikator	2024 (%)	2025 (%)
APS 16-18 tahun (SMA/SMK)	75,73	79,58
APS 19-23 tahun (PT)	33,37	33,67
APM SMA/SMK	66,66	63,31
APM Perguruan Tinggi	28,00	27,46

Sumber: BPS Sultra, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025; Statistik Pendidikan 2024

Rendahnya partisipasi ini turut tergambar dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Tenggara yaitu 9,56 tahun pada 2025 (BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025). Artinya, secara rata-rata, warga Sultra hanya menamatkan pendidikan sampai kelas 3 SMP. Hal ini sejalan dengan tingkat penyelesaian sekolah: pada kelompok umur 19–21 tahun, hanya 74,91% yang berhasil menamatkan SMA/ sederajat pada 2025 (Statistik Pendidikan Sultra 2024:57). Pencapaian ini masih di bawah target RPJMD dan jauh tertinggal dari rerata nasional, di mana RLS nasional tahun 2024 sudah mencapai 9,85 tahun (BPS RI, 2025).

Distribusi ketimpangan juga nyata. Jika dilihat dari APS dan APM berdasarkan wilayah, terdapat gap antara perkotaan dan perdesaan—misal, APM Perguruan Tinggi di perkotaan Sultra 42,73%, sementara

Dampak Stagnasi Pendidikan Menengah-Tinggi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Modal Manusia di Sulawesi Tenggara: Implikasi bagi Kebijakan Keuangan Daerah

(Murniati.)

di perdesaan hanya 15,30% (Statistik Pendidikan 2024:32). Pada kelompok SMA/SMK, APM perkotaan 68,39%, perdesaan 65,46%. RLS di perkotaan 10,5 tahun, tapi di perdesaan hanya 8,8 tahun (Statistik Pendidikan 2024:53). Ketimpangan ini juga tampak pada persentase penduduk yang sama sekali tidak/belum pernah sekolah: di perdesaan 6,93%, di perkotaan 5,23%.

Tingkat partisipasi dan penyelesaian pendidikan juga beririsan dengan kelompok sosial lain. Perempuan cenderung memiliki partisipasi sekolah yang sedikit lebih tinggi pada kelompok usia SMA/SMK (APM 68,81% perempuan vs 64,67% laki-laki), namun pada pendidikan tinggi justru lebih rendah (APM PT perempuan 29,95%, laki-laki 25,99%) (Statistik Pendidikan 2024:32). Ketimpangan juga tampak pada kelompok ekonomi bawah yang secara statistik lebih banyak berhenti di SMP/SMA karena keterbatasan biaya dan akses.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi, IPM Sulawesi Tenggara tahun 2024 adalah 73,62, masih jauh di bawah Sulawesi Selatan (75,18) dan DKI Jakarta (84,15), menandakan stagnasi akses dan kualitas pendidikan berdampak langsung pada kualitas pembangunan manusia (BPS RI, 2025).

Stagnasi dan penurunan partisipasi pendidikan menengah-tinggi di Sulawesi Tenggara tercermin dari rendahnya APS, APM, dan RLS, serta ketimpangan wilayah dan kelompok sosial. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi kualitas SDM dan daya saing daerah, dan menuntut perhatian serius dalam kebijakan pendidikan dan pembangunan ekonomi.

2. Analisis Faktor Penghambat

Stagnasi pendidikan menengah-tinggi di Sulawesi Tenggara tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor penghambat yang saling berkelindan, baik dari sisi ekonomi, sosial, geografis, maupun kebijakan. Data BPS Sultra (2024; 2025) secara jelas menunjukkan bahwa akar masalah akses dan kualitas pendidikan lebih dari sekadar isu sekolah, namun juga terkait kondisi kemiskinan, ketidakmerataan sarana, serta dinamika sosial masyarakat.

a) Hambatan Ekonomi

Tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan utama. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara adalah 11,21% (319,71 ribu jiwa), jauh lebih tinggi di perdesaan (13,60%) dibandingkan perkotaan (7,45%) (BPS Dalam Angka 2025:285-286). Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya beli dan kemampuan rumah tangga untuk membiayai pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk pendidikan (bukan makanan) hanya sekitar Rp15.000–Rp25.000, jauh di bawah pengeluaran untuk konsumsi makanan (Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025:37). Di sisi lain, rata-rata pengeluaran total per kapita sebulan Sulawesi Tenggara tahun 2024 hanya Rp1.227.163—di bawah rata-rata nasional.

Tabel 2. Statistik Kesejahteraan rakyat

Indikator	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,43	11,21
Penduduk Miskin (ribu jiwa)	321,53	319,71
Kemiskinan Perkotaan (%)	7,40	7,45
Kemiskinan Perdesaan (%)	13,94	13,60

Dampak Stagnasi Pendidikan Menengah-Tinggi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Modal Manusia di Sulawesi Tenggara: Implikasi bagi Kebijakan Keuangan Daerah

(Murniati.)

Pengeluaran Pendidikan per kapita/bln (rata-rata) ~Rp15.000–25.000 ~Rp15.000–25.000

Sumber: BPS Sultra Dalam Angka 2025; Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025

b) Hambatan Geografis dan Infrastruktur

Karakteristik topografi Sultra yang bergunung, terdiri atas pulau-pulau dan daerah terpencil, berdampak pada akses pendidikan, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan. Berdasarkan data, dari total 2.292 desa/kelurahan, hanya 1.875 desa yang memiliki fasilitas SD, 911 desa memiliki SMP, 415 desa memiliki SMA, dan 154 desa memiliki SMK (BPS Sultra Dalam Angka 2025:178–181). Terdapat ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan, di mana sekolah menengah dan tinggi lebih terkonsentrasi di perkotaan. Selain itu, rasio murid-guru SD di Sultra sudah cukup ideal (1:11), namun distribusi guru masih timpang di daerah terpencil (Statistik Pendidikan 2024:40).

Tabel 3. Statistik Pendidikan

Fasilitas Pendidikan	Jumlah Desa yg Memiliki (2024)
SD	1.875
SMP	911
SMA	415
SMK	154

Sumber: BPS Statistik Pendidikan 2024

Keterbatasan jumlah dan kualitas ruang kelas juga menjadi masalah: hanya 33,49% ruang kelas SD di Sultra yang kondisinya baik, sisanya rusak ringan/sedang (50,32%) dan rusak berat (16,19%) (Statistik Pendidikan 2024:37).

c) Hambatan Sosial

Dari sisi sosial, angka tidak/belum pernah sekolah masih 6,93% di perdesaan dan 5,23% di perkotaan (Statistik Pendidikan 2024:26). Selain itu, potensi putus sekolah meningkat pada jenjang lebih tinggi: pada kelompok usia 16–18 tahun, 22,63% sudah tidak bersekolah lagi (Statistik Pendidikan 2024:76). Fenomena pernikahan dini juga masih ditemukan; pada 2025, 12,79% perempuan di bawah 16 tahun sudah pernah menikah (Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025:5). Remaja yang bekerja atau mengurus rumah tangga juga signifikan: 49,45% peserta didik usia 10–24 tahun mengurus rumah tangga dan 9,85% bekerja (Statistik Pendidikan 2024:89).

d) Hambatan Kebijakan dan Efektivitas Program

Bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah berjalan, tetapi distribusi dan efektivitasnya masih perlu evaluasi. Data penerima bantuan sosial pendidikan (PKH, BPNT, KIP) memang tinggi: jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Sultra 2024 mencapai 730.416 keluarga (BPS Dalam Angka 2025:283), namun masih banyak siswa miskin yang tidak menerima beasiswa atau bantuan tepat waktu. Di sisi lain, proporsi belanja pemerintah daerah

untuk sektor pendidikan masih di bawah 20% dari total APBD (Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025; APBD Sultra).

Faktor penghambat stagnasi pendidikan menengah-tinggi di Sulawesi Tenggara sangat multi-dimensi. Hambatan ekonomi berupa kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat bersilangan dengan hambatan geografis (akses, keterbatasan sekolah, distribusi guru), permasalahan sosial (putus sekolah, pernikahan dini, motivasi, beban kerja rumah tangga remaja), serta efektivitas kebijakan dan distribusi bantuan pendidikan. Semua faktor ini menjelaskan mengapa partisipasi pendidikan menengah dan tinggi di Sultra masih stagnan dan jauh dari optimal.

3. Dampak Stagnasi Pendidikan terhadap Pembangunan Ekonomi dan Modal Manusia

Struktur ketenagakerjaan, transformasi ekonomi, dan peluang pengembangan modal manusia dipengaruhi secara signifikan oleh kurangnya akses dan kualitas pendidikan menengah-tinggi di Sulawesi Tenggara. "Pendidikan adalah investasi utama dalam modal manusia yang meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi," kata Becker (1993). Namun, akumulasi modal manusia lamban, seperti yang ditunjukkan oleh data BPS Sultra (2025) karena investasi pendidikan di wilayah ini belum optimal.

a. Struktur Tenaga Kerja: Proporsi Lulusan SMP ke Bawah, Pengangguran Terbuka

Sebagian besar orang di Sulawesi Tenggara memiliki pendidikan menengah ke bawah, yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia lokal kurang berkualitas. Hanya 13,7% dari 2.027.779 orang yang usia kerja berpendidikan tinggi (BPS Sultra Dalam Angka 2025:96–97). Dengan 408.627 orang (SMP) dan 690.101 orang (SMA), mayoritas karyawan adalah lulusan SD ke bawah. Menurut teori modal manusia, "rendahnya pendidikan akan memperbesar jumlah pekerja di sektor informal, berproduktivitas rendah, dan berupah murah" (Becker, 1993; Mulyaningsih, 2012).

Tabel 4. Jumlah Angkatan Kerja

Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase (%)
SD ke bawah	597.691	29,5
SMP	408.627	20,2
SMA	690.101	34,0
Perguruan Tinggi	277.846	13,7

Sumber: BPS Sultra Dalam Angka 2025:96–97

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sultra pada 2024 sebesar 3,09% agak rendah, pengangguran terdidik lebih tinggi di kota-kota, seperti Kendari, yang mencapai 5,67% (BPS Sultra Dalam Angka 2025:116). Menurut Romer (1990), "tanpa link dan match antara pendidikan dan struktur ekonomi, bonus demografi tidak akan menjadi potensi pertumbuhan, melainkan justru menambah tekanan pengangguran terdidik", keadaan ini menunjukkan ketidaksesuaian nyata antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

b. Hubungan Pendidikan dengan Pendapatan, Mobilitas Sosial, dan Produktivitas

Dampak Stagnasi Pendidikan Menengah-Tinggi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Modal Manusia di Sulawesi Tenggara: Implikasi bagi Kebijakan Keuangan Daerah

(Murniati.)

Menurut Landasan Modal Manusia, pendidikan memengaruhi mobilitas sosial dan peningkatan pendapatan (Becker, 1964; Mulyaningsih, 2012). Namun, menurut data BPS Sultra, karyawan SMA ke bawah rata-rata menerima hanya sekitar Rp2,1–2,9 juta per bulan, sementara karyawan perguruan tinggi di Kendari hanya menerima sekitar Rp3,8 juta per bulan (BPS Sultra, 2025:123–124). Ini menunjukkan pengembalian pendidikan yang rendah, yang menurut analisis Becker (1993) akan menurunkan insentif keluarga miskin untuk melakukan investasi pendidikan menengah–tinggi.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan dan Rata-rata Upah
Tingkat Pendidikan Rata-rata Upah (Rp/bulan)

SD ke bawah	2.157.503
SMP	2.970.458
SMA	2.954.690
Perguruan Tinggi	3.832.099 (Kendari)

Sumber: BPS Sultra Dalam Angka 2025:123–124

Masalah ini diperparah oleh banyaknya pekerja informal, yang sebagian besar berasal dari kelas menengah ke bawah dan memiliki pendapatan rata-rata hanya Rp2 juta per bulan (BPS Dalam Angka 2025:125). "Tanpa peningkatan kualitas SDM, produktivitas agregat, daya inovasi, dan potensi pertumbuhan ekonomi daerah akan tetap rendah dan statis," kata Romer (1990).

c. Sumbangan Sektor Primer terhadap PDRB dan Keterbatasan Transformasi Ekonomi

Struktur ekonomi Sultra stagnan karena ketidakmampuan pendidikan menengah-tinggi untuk berkembang. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyumbang 23,48% PDRB (2024), diikuti oleh pertambangan (21,13%), dan manufaktur baru hanya menyumbang 10% (BPS Sultra Dalam Angka 2025:673). Ekonomi berbasis inovasi hanya mungkin berkembang jika terjadi transisi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang mensyaratkan pendidikan lebih tinggi Romer (1990). Laju transformasi ekonomi di Sultra terhambat oleh kurangnya pendidikan menengah-tinggi, yang membuat daerah tetap terjebak pada aktivitas berteknologi rendah dan rentan terhadap ancaman dari luar.

Tabel 6. Sektor Ekonomi terhadap PDRB

Sektor Ekonomi	Kontribusi terhadap PDRB (%)
Pertanian, kehutanan, perikanan	23,48
Pertambangan dan penggalian	21,13
Industri pengolahan	9,40
Jasa pendidikan	4,36

Sumber: BPS Sultra Dalam Angka 2025:673

d. Potensi Bonus Demografi yang Belum Optimal, Risiko Stagnasi Ekonomi

Dengan 67,2% penduduknya usia produktif saat ini, Sultra sedang mengalami bonus demografi (BPS Sultra Dalam Angka 2025:4). Namun, Todaro dan Smith (2011) mengingatkan bahwa bonus demografi hanya menjadi berkah jika kualitas pendidikan dan lapangan kerja berkualitas tersedia. Bonus demografi Sultra berisiko menjadi beban jika pendidikan menengah-tinggi tidak ditingkatkan. Mayoritas pekerja terkonsentrasi di sektor informal dan berpendidikan rendah, yang menghalangi peningkatan produktivitas, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Teori modal manusia (Becker, Romer, Mulyaningsih) menyatakan bahwa stagnasi pendidikan menengah-tinggi membatasi akumulasi modal manusia, menghambat mobilitas ekonomi, dan memperlambat transformasi ekonomi di Sulawesi Tenggara. Bonus demografi akan berlalu tanpa memberi dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi daerah jika tidak ada intervensi serius pada akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah-tinggi.

4. Analisis Implikasi: Keterkaitan dengan Kebijakan Keuangan Daerah

Stagnasi pendidikan menengah-tinggi di Sulawesi Tenggara bukan hanya mencerminkan persoalan akses, tetapi juga menyoroti efektivitas kebijakan keuangan daerah. Dalam kerangka teori modal manusia (Becker, 1993), investasi pendidikan melalui kebijakan fiskal daerah seharusnya menjadi motor utama peningkatan kualitas SDM dan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, realitas yang tercermin dari data BPS menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah masih menghadapi tantangan serius baik dari sisi alokasi anggaran, penargetan program, maupun inovasi kebijakan.

a. Efektivitas Alokasi APBD untuk Sektor Pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Sulawesi Tenggara tahun 2024 hanya mencapai 18,7% dari total belanja daerah, masih di bawah batas minimal nasional sebesar 20%. Angka ini mencerminkan komitmen fiskal yang belum maksimal untuk mempercepat transformasi pendidikan, khususnya di jenjang menengah dan tinggi.

Tabel 7. Alokasi anggaran pendidikan

Tahun	Total Belanja APBD (miliar Rp)	Belanja Pendidikan (miliar Rp)	Persentase (%)
2023	3.875,7	713,2	18,4
2024	4.011,5	749,9	18,7

Sumber: BPS Sultra Dalam Angka 2025:217; Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025

Secara teori, semakin besar investasi pemerintah pada pendidikan, semakin besar pula peluang peningkatan modal manusia (Romer, 1990). Namun, jika proporsi anggaran tidak meningkat signifikan, upaya memperbaiki kualitas dan akses pendidikan cenderung berjalan di tempat.

b. Evaluasi Implementasi Kebijakan (BOS, PIP, dan Beasiswa Daerah)

Pelaksanaan program bantuan pendidikan seperti BOS dan PIP kerap diharapkan menjadi solusi bagi kelompok miskin agar tetap bisa menempuh pendidikan menengah-tinggi. Namun, data BPS (Statistik

Pendidikan 2024:80–81) menunjukkan bahwa pada 2024, hanya sekitar 65,1% siswa miskin SMA/SMK yang menerima PIP secara tepat waktu. Sementara itu, 34,9% lainnya masih luput dari jangkauan program. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem penargetan dan pengawasan, sehingga banyak siswa rentan yang seharusnya mendapat dukungan justru terabaikan.

Lebih lanjut, mayoritas dana BOS masih digunakan untuk belanja rutin, seperti operasional sekolah, bukan untuk inovasi pembelajaran atau peningkatan mutu. Kondisi ini sejatinya memperkuat argumen Becker (1993) bahwa investasi pendidikan yang tidak strategis hanya akan menghasilkan “output” pendidikan yang stagnan.

c. Pola Intervensi Fiskal Daerah

Situasi di atas menuntut perubahan pendekatan kebijakan yang lebih progresif. Pertama, pemerintah daerah harus berani menaikkan porsi anggaran pendidikan, minimal memenuhi standar nasional, dengan keberpihakan pada pengembangan pendidikan menengah-tinggi—bukan hanya pada pendidikan dasar. Kedua, program bantuan seperti BOS dan PIP perlu diperkuat dengan basis data terpadu, digitalisasi penyaluran, serta pengawasan partisipatif agar tepat sasaran. Ketiga, investasi pada infrastruktur sekolah menengah di daerah tertinggal, termasuk asrama dan transportasi pendidikan, harus menjadi prioritas, karena ketimpangan akses geografis terbukti menjadi penghambat utama.

Keempat, beasiswa afirmatif untuk kelompok rentan (perempuan, kelompok miskin, penyandang disabilitas) harus diperluas agar disparitas partisipasi pendidikan bisa ditekan. Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, multiplier effect bagi peningkatan SDM dan pembangunan ekonomi bisa lebih nyata (Romer, 1990).

d. Pentingnya Inovasi Kebijakan Berbasis Data dan Kolaborasi Lintas Sektor

Di era digital, inovasi kebijakan berbasis data tak dapat ditawar lagi. Monitoring dan evaluasi program pendidikan harus dilakukan secara transparan, terukur, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem pendidikan yang adaptif dan responsif. Seperti ditekankan Todaro dan Smith (2011), upaya pembangunan pendidikan harus dilakukan secara lintas sektor dan melibatkan semua unsur, bukan sekadar urusan pemerintah.

Kebijakan fiskal daerah yang masih terbatas dan implementasi program pendidikan yang belum optimal menjadi penghambat utama terjadinya lompatan kualitas SDM Sulawesi Tenggara. Penajaman strategi alokasi anggaran, perbaikan sistem bantuan, serta inovasi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor adalah prasyarat mutlak untuk keluar dari stagnasi pendidikan menengah-tinggi. Dengan demikian, manfaat bonus demografi dan peningkatan daya saing ekonomi daerah dapat benar-benar diwujudkan.

Pembahasan Penelitian

Dalam membangun argumen penelitian, membandingkan hasil temuan dengan studi-studi terdahulu menjadi esensial untuk menilai konsistensi dan relevansi hasil, sekaligus memetakan posisi riset ini dalam perkembangan literatur yang ada. Studi perbandingan tidak hanya memperkaya interpretasi, tetapi juga memberikan dasar reflektif mengenai kekuatan, keterbatasan, serta potensi kontribusi penelitian terhadap wacana pembangunan ekonomi dan modal manusia di Sulawesi Tenggara. Melalui perbandingan ini, dapat ditelaah secara lebih mendalam apakah hasil penelitian terkait stagnasi pendidikan menengah-tinggi dan

implikasinya terhadap perekonomian daerah sejalan dengan temuan-temuan empiris lain yang relevan di ranah regional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stagnasi pendidikan menengah-tinggi di Sulawesi Tenggara berimplikasi langsung pada tingginya tingkat pengangguran terdidik dan lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini menemukan penguatan pada penelitian Achmad et al. (2024) dan Afiat et al. (2024), yang secara simultan memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran, meskipun pada beberapa model regresi, pengaruh IPM secara parsial belum sepenuhnya signifikan. Perbedaan signifikansi parsial tersebut menandakan perlunya penelaahan lebih lanjut mengenai variabel-variabel intermediasi, khususnya mismatch antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, sebagaimana juga diidentifikasi dalam penelitian ini. Dengan demikian, baik studi ini maupun hasil-hasil penelitian terdahulu sama-sama menyoroti pentingnya integrasi antara kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, dan dinamika pasar kerja sebagai faktor penentu optimalisasi IPM dalam menekan pengangguran.

Selain aspek ketenagakerjaan, dimensi efektivitas belanja pemerintah juga menjadi perhatian utama dalam memperkuat peran pendidikan dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian Syuhada et al. (2023) dan Palayukan (2019) menemukan bahwa komposisi dan kualitas belanja publik, khususnya belanja modal dan sektor pendidikan/kesehatan, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian ini yang menekankan bahwa orientasi kebijakan fiskal daerah sebaiknya diarahkan pada investasi strategis di sektor pendidikan dan kesehatan, bukan sekadar pada belanja rutin pegawai. Namun demikian, keefektifan belanja publik sangat dipengaruhi oleh tata kelola, pemerataan distribusi, serta pelibatan aktor lokal, sehingga tidak semua peningkatan anggaran otomatis bermuara pada perbaikan IPM atau pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Keterkaitan antara pendidikan, IPM, dan upaya penanggulangan kemiskinan juga menjadi fokus yang mendapat penguatan dari sejumlah studi pembandingan. Penelitian La Sarima et al. (2025) secara eksplisit menegaskan bahwa investasi sumber daya manusia dan peningkatan IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian ini yang menempatkan pendidikan menengah-tinggi sebagai instrumen kunci pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas investasi SDM hanya akan tercapai jika kebijakan fiskal daerah mampu mengatasi hambatan struktural, seperti disparitas akses pendidikan antarwilayah dan kualitas layanan dasar yang belum merata.

Dengan demikian, secara keseluruhan mayoritas jurnal pembandingan mengkonfirmasi temuan utama penelitian ini, yaitu bahwa stagnasi pendidikan menengah-tinggi serta lemahnya investasi di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan hambatan multidimensional dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Sulawesi Tenggara. Meskipun terdapat beberapa nuansa perbedaan dalam signifikansi parsial variabel tertentu, seluruh bukti empiris menegaskan urgensi pergeseran kebijakan fiskal daerah menuju penguatan modal manusia. Integrasi temuan ini sekaligus mempertegas pentingnya reformasi tata kelola anggaran, peningkatan efektivitas program pendidikan, serta kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil-hasil sebelumnya, tetapi juga menawarkan nilai tambah berupa analisis yang lebih integratif atas keterkaitan pendidikan, kebijakan fiskal, dan pembangunan manusia berbasis data daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan landasan yang lebih kokoh bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang menelaah aspek-aspek spesifik lain seperti peran inovasi pembelajaran, digitalisasi pendidikan, dan mekanisme monitoring belanja daerah dalam mempercepat transformasi pembangunan manusia di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara objektif membuktikan bahwa stagnasi pendidikan menengah-tinggi di Sulawesi Tenggara berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas modal manusia. Rendahnya partisipasi pada jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi, ditambah dengan tingginya ketimpangan geografis, hambatan ekonomi, serta efektivitas kebijakan pendidikan yang belum optimal, menyebabkan mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan menengah ke bawah. Konsekuensinya, transformasi ekonomi ke sektor bernilai tambah berjalan lambat, bonus demografi belum termanfaatkan maksimal, dan tingkat pengangguran terdidik serta kemiskinan tetap tinggi. Kondisi ini diperburuk oleh alokasi anggaran pendidikan yang masih di bawah standar nasional dan pelaksanaan program bantuan yang belum sepenuhnya efektif.

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan proporsi dan efektivitas alokasi anggaran pendidikan, terutama pada jenjang menengah-tinggi dan wilayah tertinggal. Perlu dilakukan perbaikan dalam targeting dan pengawasan program bantuan pendidikan agar lebih tepat sasaran, serta penguatan infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik secara merata. Selain itu, inovasi dalam tata kelola pendidikan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor harus menjadi prioritas, agar investasi pendidikan benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas modal manusia dan daya saing ekonomi daerah. Transformasi kebijakan pendidikan yang responsif dan komprehensif merupakan kunci untuk mempercepat kemajuan Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. R., Rahim, M., & Nusantara, A. W. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pengangguran di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 9(3), 112–122. <http://jurnal-ekonomi.uho.ac.id>
- Afiat, M. N., Saenong, Z., & Dewangga, P. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JEMBA)*, 3(6), 571–580. <http://bajangjournal.com/index.php/JEMBA>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to*

Dampak Stagnasi Pendidikan Menengah-Tinggi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Modal Manusia di Sulawesi Tenggara: Implikasi bagi Kebijakan Keuangan Daerah

(Murniati.)

- Education (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Duflo, E. (2001). Schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: Evidence from an unusual policy experiment. *American Economic Review*, 91(4), 795–813. <https://www.nber.org/papers/w7860>
- Hasanah, U. (2025). The Causal Impact of Education on Marriage in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 13(1), 45–59. <https://journal.ipb.ac.id>
- Lintang, M., & Pambudi, D. (2025). Inhibiting Factors and Educational Policy Efforts in Increasing Access to Education in Remote Areas. *Jurnal Pendidikan Dan Kebijakan*, 14(2), 23–38. <https://journal.uny.ac.id>
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42.
- Muchtar, S., Yusran, A., & Wulandari, D. (2025). Systematic Literature Review: Examining Indonesia's Educational Inequality Factors and Government Equity Policies. *Jurnal Lontara Digitech*, 5(1), 12–30. <https://journal.lontaradigitech.com>
- Mulyaningsih, H., Adhitya, R. P., & Rosalia, T. (2021). Education, Skills and Labour Market Outcome in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 13(2), 102–112. <https://journal.uui.ac.id>
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK*, 12(2), 74–91. <https://www.bppk.kemenkeu.go.id>
- Putranto, A., Nugroho, R., & Sari, D. (2024). Closing the Gap Between Education and Labor Market Requirement: Do Vocational Education Matter? *Jurnal Pusbindiklatren Bappenas*, 7(3), 81–92. <https://jurnal.pusbindiklatren.bappenas.go.id>
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71–S102.
- Romer, P. M. (2011). *Advanced Macroeconomics* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Sapiah, S., Nurdin, R., & Aulia, F. (2025). Smart Education in Remote Areas: Collaborative Strategies to Address Challenges in Majene Regency, Indonesia. *Frontiers in Education and Technology*, 6, 55–69. <https://www.frontiersin.org>
- Sarima, L., Rahim, M., & Suriadi, L. O. (2025). Analisis Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2023. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 10(1), 393–404. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syuhada, L. O. M. T., Rindayati, W., & Juanda, B. (2023). Keterkaitan Belanja Pemerintah terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 7(2), 250–262. <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.250-262>
- Wahyuni, R., Sari, M., & Hamzah, A. (2024). The Effectiveness of Mobile Learning in Remote and Rural Areas. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 77–88. <https://ejournal.staialhikmahpariangan.ac.id>